

Historitas Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia

HISTORITAS LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA

Ifa Afida

Dosen Tetap PAI INAFAS Kencong Jember

ABSTRACT

Islamic education in Indonesia has been going on since the inclusion of Islam in Indonesia. In the early stages of Islamic Education begins, educational institutions have not been formed and available, seeing the beginning of the process of Islamic education that has not been systematic and emphasizes the process of da'wah carried out by preachers to their students, both personal and collective contacts. After the Muslim community was formed in an area, they began to build mosques. The mosque is functioned as a place of worship and education. The mosque is an Islamic educational institution that first appeared beside the house where the ulama or muballigh lived. After that other Islamic education institutions emerged, such as pesantren, surau, dayah. The name of the institution is different because it is influenced by differences in place, tradition and culture. But, even though the names are different, they have the same goal, namely as a process place in studying Islamic education. Furthermore, Islamic Education institutions continue to experience development in accordance with the discussions that occurred in Indonesia.

KeyWords : *Institutions, Islamic Education, Periodic Institutions of Islamic Education*

PENDAHULUAN

Masuknya Islam ke Indonesia agak unik dibandingkan dengan masuknya Islam ke daerah- daerah lain. Keunikannya terlihat kepada proses masuknya Islam ke Indonesia yang relatif berbeda dengan daerah lain. Islam masuk ke Indonesia secara damai dibawa oleh para pedagang dan muballigh. Adapun Islam masuk ke daerah lain pada umumnya banyak lewat penaklukan, seperti misalnya masuknya Islam ke Iraq, Iran, Mesir, Afrika Utara sampai Andalusia.¹ Sejalan dengan masuknya Islam di Indonesia tersebut, maka Pendidikan Islam pun mulai berjalan juga, tentunya lembaga pendidikan islam sebagai salah satu komponen pendidikan Islam tidak bisa lepas dari proses berlangsungnya pendidikan Islam itu sendiri.

¹Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014), 11

Pada tahap awal Pendidikan Islam dimulai dari kontak pribadi maupun kolektif antara muballigh (pendidik) dengan peserta didiknya.² Islam menunjukkan eksistensinya pada abad ke- 13 M di Sumatera dan 15 M di Jawa setelah Islam berhasil memasuki wilayah kekuasaan politik yang selanjutnya dipakai untuk mendapatkan dukungan rakyat agar mereka memeluk Islam. Kampanye besar- besaran atas Islam terjadi ketika kaum muslimin memegang hegemoni politik di pesisir Jawa. Sebelumnya, Islam sebagai pendatang baru merupakan komunitas kecil yang kurang berarti dan tidak diperhitungkan. Interaksi antar pedagang muslim dari berbagai negeri seperti Arab, Persia, anak benua India, Jeumpa, Melayu dan China yang berlangsung lama dan intensif membuat komunitas ini secara gradual makin berwibawa, dan pada akhirnya mampu membentuk masyarakat muslim, sekaligus membentuk jaringan yang solid diantara mereka. Islam yang masuk kedalam wilayah kekuasaan kerajaan mengindikasikan, bahwa Islam telah mampu menjadi kekuatan yang berpengaruh dan diperhitungkan oleh penguasa lokal.³

Hal ini menunjukkan bahwa masuknya Islam ke Indonesia yang dilakukan secara damai menjadi sumber kekuatan dalam mengembangkan Islam dengan memperhatikan agama, adat, budaya, seni masyarakat pada saat itu. Dampak positif yang lain, hal ini menjadi keuntungan bagi pengembangan pendidikan Islam dan pertumbuhan serta pengembangan lembaga Pendidikan Islam di Indonesia.

PEMBAHASAN

Kajian Tentang Lembaga Pendidikan

1. Pengertian Lembaga Pendidikan

Secara etimologi, lembaga adalah asal sesuatu, acuan, sesuatu yang memberi bentuk pada yang lain, badan atau organisasi yang bertujuan untuk mengadakan suatu penelitian keilmuan atau melakukan sesuatu usaha.⁴ Dalam bahasa Inggris, lembaga disebut *Institute* (dalam pengertian fisik), yaitu sarana atau organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan lembaga dalam pengertian non fisik atau abstrak disebut *Institution*, yaitu suatu sistem norma untuk memenuhi kebutuhan. Lembaga dalam pengertian fisik disebut juga dengan *bangunan*, dan lembaga dalam pengertian non fisik disebut dengan *pranata*. Secara terminologi

²*Ibid.* 1

³Abdul Karim, *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009), 327

⁴Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo E. Sembiring, 2005), 367

dari kutipan Ramayulis oleh Hasan Langgulung, bahwa lembaga pendidikan adalah suatu sistem peraturan yang bersifat abstrak, suatu konsepsi yang terdiri dari kode-kode, norma-norma, ideologi-ideologi dan sebagainya, baik tertulis atau tidak, termasuk perlengkapan material dan organisasi simbolik: kelompok manusia yang terdiri dari individu-individu yang dibentuk dengan sengaja atau tidak, untuk mencapai tujuan tertentu dan tempat-tempat kelompok itu melaksanakan peraturan-peraturan tersebut adalah: masjid, sekolah, kuttub dan sebagainya.⁵

Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kosakata lembaga memiliki empat arti, yaitu: 1) asal mula (yang akan jadi sesuatu); benih (bakal binatang, manusia, dan tumbuhan; misalnya Adam, segumpal tanah yang dijadikan manusia pertama; 2) bentu (rupa, wujud) yang asli, acuan; 3) ikatan (tentang mata cincin dan sebagainya); 4) badan (organisasi) yang bermaksud melakukan penyelidikan keilmuan atau melakukan sesuatu usaha; misalnya Bahasa Indonesia.⁶

Dalam pengertian tersebut, berarti makna lembaga pendidikan yang digunakan yaitu pengertian lembaga ketiga, yaitu badan atau organisasi yang melakukan sesuatu kegiatan. Dengan demikian, maka yang dimaksud dengan lembaga pendidikan adalah badan atau organisasi yang melakukan kegiatan.

2. Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam menurut Hasbullah adalah wadah atau tempat berlangsungnya proses pendidikan Islam yang bersamaan dengan proses pembudayaan. Kelembagaan pendidikan Islam merupakan subsistem dari masyarakat atau bangsa. Dalam operasionalitasnya selalu mengacu dan tanggap kepada kebutuhan perkembangan masyarakat. Tanpa bersikap demikian, lembaga pendidikan Islam dapat menimbulkan kesenjangan sosial dan kultural. Kesenjangan inilah menjadi salah satu sumber konflik antara pendidikan dan masyarakat. Dari sanalah timbul krisis pendidikan yang intensitasnya berbeda-beda menurut tingkat atau taraf kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pendidikan Islam haruslah sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat, sebab tanpa memperhatikan hal tersebut, barangkali untuk mencapai kemajuan dalam perkembangannya agak sulit.⁷

Lembaga pendidikan Islam merupakan hasil pemikiran yang dicetuskan oleh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang didasari, digerakkan, dan

⁵Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006), 277

⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-12* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991), 582

⁷Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam, Cet I*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996), 38-39.

dikembangkan oleh jiwa Islam (Al- Qur'an dan As Sunnah). Lembaga pendidikan Islam secara keseluruhan, bukanlah suatu yang datang dari luar, melainkan dalam pertumbuhan dan perkembangannya mempunyai hubungan erat dengan kehidupan Islam secara umum. Lembaga Pendidikan Islam bukanlah lembaga beku, akan tetapi fleksibel, berkembang dan menurut kehendak waktu dan tempat. Hal ini seiring dengan luasnya daerah Islam yang membawa dampak pada penambahan jumlah penduduk Islam. Dan adanya keinginan untuk memperoleh aktifitas belajar yang memadai. Sejalan dengan semakin berkembangnya pemikiran tentang pendidikan, maka didirikanlah berbagai macam lembaga pendidikan Islam yang teratur dan terarah.

Adapun sifat dan karakter pendidikan Islam menurut Abuddin Nata adalah:

1. Lembaga Pendidikan Islam bersifat holistik, terdiri dari lembaga pendidikan informal, non formal dan formal. Bentuk lembaga pendidikan informal dapat diwakili oleh rumah (*al-bait*); lembaga pendidikan non formal terdiri dari masjid, *al-maristan*, *al-zawiyah*, *al-ribath*, *al-kuttab*, *al-hawanit al-wariqin*, *al-shollun al-adabiyah*, *al-badiyah*, dan *al-maktabat (darul hikmah dan bait hikmah)*, sedangkan yang bersifat formal yaitu madrasah.
2. Lembaga pendidikan Islam bersifat dinamis dan inovatif. Dinamakan dinamis, karena lembaga pendidikan Islam tidak terpaku pada satu bentuk saja, melainkan mengambil berbagai bentuk sesuai dengan kebutuhan ilmu atau keterampilan yang ingin dikembangkan. Dan dikatakan inovatif, karena lembaga pendidikan Islam selalu mengalami perubahan dan pengembangan yang tidak ada contoh atau model sebelumnya.
3. Lembaga pendidikan Islam bersifat responsif dan fleksibel, yakni senantiasa menyesuaikan diri atau menjawab berbagai kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, umat Islam telah menggunakan seluruh kemungkinan yang tersedia untuk kepentingan pendidikan. Dengan demikian, lembaga pendidikan Islam telah membuktikan salah satu sifat pendidikan Islam yang menerapkan prinsip belajar seumur hidup, dan belajar dimana saja.
4. Lembaga pendidikan Islam bersifat terbuka, yakni dapat diakses atau digunakan untuk seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai latar belakang keahlian, status sosial, ekonomi, budaya, dan lain sebagainya. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam.
5. Lembaga pendidikan Islam berbasis pada masyarakat. Hal ini selain karena lembaga pendidikan Islam tersebut dapat digunakan oleh seluruh masyarakat, juga karena dibangun dan diadakan oleh seluruh masyarakat. Lembaga pendidikan Islam berasal dari, dan untuk masyarakat. Para raja,

hartawan, dan ulama termasuk diantara anggota masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan lembaga pendidikan.

6. Lembaga pendidikan Islam bersifat religius. Hal ini terjadi karena berdirinya lembaga pendidikan Islam selain untuk kepentingan pengembangan ilmu dalam rangka mencerdaskan masyarakat, juga dilakukan karena semata-mata mengharap keridhoan Allah SWT. berdirinya lembaga pendidikan Islam bukan atas intruksi atau undang-undang, melainkan atas dorongan niat yang ikhlas mengharap keridhaan Allah SWT.⁸

Dari sifat dan karakter yang dikemukakan di atas, maka lembaga pendidikan Islam bersifat Universal. Artinya, pengkajian tentang lembaga pendidikan Islam baik yang bersifat klasik sampai kepada lembaga pendidikan modern sudah terpetakan. Lembaga pendidikan bukan semata-mata mencakup kegiatan pendidikan saja, tetapi juga mencakup kegiatan keagamaan dan sosial kemasyarakatan.

Kajian Tentang Pendidikan Islam

Menurut Undang- Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) Bab 1 pasal 1 ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁹ Sedangkan menurut Islam pendidikan adalah pemberi corak hitam putihnya perjalanan hidup seseorang. Oleh karena itu ajaran Islam menetapkan bahwa pendidikan merupakan salah satu kegiatan yang wajib hukumnya bagi pria dan wanita, dan berlangsung seumur hidup- semenjak dari buaian hingga ajal datang (al-Hadis)- *long life education*.¹⁰

Sejalan dengan pemikiran tersebut, para ahli memberikan definisi tentang Pendidikan Islam, antara lain menurut Omar Muhammad al- Toumy al- Syaibani dalam Abuddin Nata, pendidikan adalah “Proses mengubah tingkah laku individu, pada kehidupan pribadi, masyarakat, dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan sebagai profesi diantara profesi- profesi asasi dalam masyarakat.”¹¹

⁸Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana 2010), 214-215

⁹UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2009), 98

¹⁰Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 1

¹¹ Abuddin Nata, *Ilmu Pendidikan...*, 28

Selanjutnya, dalam Abuddin Nata juga, pengertian pendidikan menurut ahli diantaranya pendidikan menurut Hasan Langgulung yang mengatakan pendidikan adalah suatu proses yang mempunyai tujuan yang biasanya diusahakan untuk menciptakan pola pola tingkah laku tertentu pada kanak kanak atau orang yang sedang dididik. Menurut Ahmad Fuad al Hawany, pendidikan adalah pranata yang bersifat sosial yang tumbuh dari pandangan hidup tiap masyarakat. Pendidikan senantiasa sejalan dengan pandangan falsafah hidup masyarakat tersebut, atau pendidikan itu pada hakikatnya mengaktualisasikan falsafah dalam kehidupan nyata. Selanjutnya Ali Khalil Abul A'inain mengatakan pendidikan adalah program yang bersifat kemasyarakatan, dan oleh karena itu, setiap falsafah yang dianut oleh suatu masyarakat berbeda dengan falsafah yang dianut oleh masyarakat lain sesuai dengan karakternya, serta kekuatan peradaban yang memengaruhinya yang dihubungkan dengan upaya menegakkan spiritual dan falsafah yang dipilih dan disetujui untuk memperoleh kenyamanan hidupnya. Makna dari ungkapan tersebut ialah bahwa tujuan pendidikan diambil dari tujuan masyarakat, dan perumusan operasionalnya ditujukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan disekitar tujuan pendidikan tersebut terdapat atmosfer falsafah hidupnya. Dari keadaan yang demikian itu, maka falsafah pendidikan yang terdapat dalam suatu masyarakat berbeda dengan falsafah pendidikan yang terdapat pada masyarakat lainnya, yang disebabkan perbedaan sudut pandang masyarakat, serta pandangan hidup yang berhubungan dengan sudut pandang tersebut.¹²

Pendidikan Islam menurut Zakiah Drajat merupakan pendidikan yang lebih banyak ditujukan kepada perbaikan sikap mental yang akan terwujud dalam amal perbuatan, baik bagi keperluan diri sendiri maupun orang lain yang bersifat teoritis dan praktis.¹³

Dalam rumusan pendidikan yang dipaparkan oleh para ahli, Abuddin Nata menyimpulkan beberapa hal, diantaranya:

1. Seluruh rumusan pendidikan selalu memiliki obyek atau sasaran yang sama, yaitu manusia. Hal ini dapat diketahui, dengan melihat tugas utama pendidikan yaitu meningkatkan sumber daya manusia.
2. Seluruh rumusan pendidikan selalu menempatkan pendidikan sebagai sarana yang strategis untuk melahirkan manusia yang terbina seluruh potensi dirinya (fisik, psikis, akal, spiritual, fitrah, talenta, sosial) sehingga dapat melaksanakan

¹² *Ibid.* 29

¹³ Zakiah Drajat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), 25

fungsi pengabdianya dalam rangka beribadah kepada Allah SWT serta mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Seluruh rumusan pendidikan tersebut selalu dilihat dari kebutuhan masyarakat dan budaya. Pendidikan dan budaya. Pendidikan adalah sarana yang paling strategis untuk menanamkan nilai-nilai, ajaran, keterampilan, pengalaman, dan sebagainya yang datang dari luar ke dalam diri peserta didik. Hal ini menunjukkan masih kuatnya pengaruh ideologi pendidikan normatif perenialis. Ideologi progresivisme yang menempatkan pendidikan hanya sebagai fasilitator yang melayani kebutuhan manusia tampaknya belum diterima kalangan para ahli pendidikan Islam pada umumnya. Pendidikan yang seharusnya mengikuti kebutuhan peserta didik, sebagaimana dianut oleh ideologi pendidikan progresivisme tampaknya belum menjadi pilihan pendidikan Islam.
4. Sesuai dengan karakteristik ajaran Islam yang mengedepankan prinsip keseimbangan, seharusnya pendidikan Islam dirancang berdasarkan prinsip yang memadukan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Kepentingan masyarakat yang terkait dengan pelestarian nilai, ajaran, dan norma yang berlaku di masyarakat seharusnya diperhatikan oleh pendidikan dalam rangka menjaga terciptanya keharmonisan dan stabilitas dalam kehidupan. Demikian pula kepentingan individu yang terkait dengan penyaluran bakat, minat, hobi, dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki manusia, seharusnya juga diperhatikan. Dengan demikian, terjadi keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.¹⁴

Pengertian dan penjelasan Pendidikan Islam diatas menunjukkan bahwa pendidikan memiliki makna yang beragam, hal ini sebagai bentuk keseriusan dalam merumuskan visi pendidikan itu sendiri. Pendidikan tidak boleh mengabaikan pengembangan potensi manusia, tetapi harus cermat dalam membina potensi manusia.

Periodisasi Lembaga Pendidikan di Indonesia

Dalam perkembangannya, pendidikan Islam di Indonesia antara lain ditandai oleh munculnya berbagai lembaga pendidikan secara bertahap, mulai dari yang amat sederhana, sampai dengan tahap-tahap yang sudah terhitung modern dan lengkap. Lembaga Pendidikan Islam telah memainkan perannya sesuai dengan tuntunan masyarakat dan zamannya. Perkembangan lembaga-lembaga pendidikan tersebut telah menarik perhatian para ahli baik dari dalam maupun luar

¹⁴ *Opcit.* 31–32

negeri untuk melakukan studi ilmiah secara konferensif. Kini sudah banyak sekali hasil karya penelitian para ahli yang menginformasikan tentang pertumbuhan dan perkembangan lembaga- lembaga pendidikan Islam tersebut. Tujuannya selain untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan yang bernuansa keislaman, juga sebagai bahan rujukan dan perbandingan bagi para pengelola pendidikan Islam pada masa- masa berikutnya. Hal ini sejalan dengan prinsip yang pada umumnya dianut masyarakat Islam Indonesia., yaitu mempertahankan tradisi masa lampau yang masih baik dan mengambil tradisi baru yang lebih baik lagi. Dengan cara demikian, upaya pengembangan lembaga pendidikan Islam tersebut tidak akan terserabut dari akar budayanya secara radikal.¹⁵

Pada awal perkembangan Islam di Indonesia, masjid merupakan satu-satunya pusat berbagai kegiatan. Baik kegiatan keagamaan, sosial kemasyarakatan, maupun kegiatan pendidikan. Bahkan kegiatan pendidikan yang berlangsung di masjid masih bersifat sederhana kala itu sangat dirasakan oleh masyarakat muslim. Maka tidak mengherankan apabila masyarakat dimasa itu menaruh harapan besar kepada masjid sebagai tempat yang bisa membangun masyarakat muslim yang lebih baik. Awal mulanya masjid mampu menampung kegiatan pendidikan yang diperlukan masyarakat. Namun karena terbatasnya tempat dan ruang, mulai dirasakan tidak dapat menampung masyarakat yang ingin belajar. Maka dilakukannya berbagai pengembangan secara bertahap hingga berdirinya lembaga pendidikan Islam yang secara khusus berfungsi sebagai sarana menampung kegiatan pembelajaran sesuai dengan tuntutan masyarakat saat itu. Dari sinilah mulai muncul beberapa istilah lembaga pendidikan di Indonesia.¹⁶

1. Pesantren

Perkataan pesantren berasal dari kata santri, dengan awalan pe dan akhiran an yang berarti tempat tinggal santri.¹⁷ Dengan nada yang sama Soegarda dalam Haidar menjelaskan pesantren asal katanya adalah santri, yaitu seorang yang belajar agama Islam, sehingga dengan demikian, pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.¹⁸ Dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia kita melihat bahwa semenjak tiga abad yang lalu pesantren telah

¹⁵ KM Akhiruddin, *Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*, Jurnal Tarbiya, vol 1 no. 1-2015 (192-219)

¹⁶ <http://istanailmu.com/2011/02/03/latar-belakang-munculnya-lembaga-pendidikan-islam-di-indonesia/html> diakses tanggal 05 Januari 2018

¹⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 783

¹⁸ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan...*, 61

berperan mencerdaskan kehidupan bangsa. Begitu juga dalam mewujudkan kemerdekaan Republik Indonesia para Kyai maupun para santri juga ikut berjuang bahu membahu bersama rakyat mengusir penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang. Oleh karena itu, setelah Indonesia mencapai kemerdekaannya, pesantren masih mendapatkan tempat dihati masyarakat Indonesia. Ki Hajar Dewantara saja yang dikenal sebagai tokoh Pendidikan Nasional dan sekaligus sebagai Menteri Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan RI yang pertama menyatakan bahwa pondok pesantren merupakan dasar pendidikan nasional, karena sesuai dan selaras dengan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia.¹⁹

Berdasarkan referensi yang penulis kaji, ada beberapa pesantren yang menjadi era awal pendidikan Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan Indonesia. Diantaranya; di Sumatera ada pondok pesantren yang pertama kali membuka madrasah formal, yaitu Tawalib di Padang Panjang pada tahun 1921 M di bawah pimpinan Syekh H. Abdullah Ahmad dan Syekh Abd. Karim Amrullah, di Jambi didirikan pesantren dan madrasah Nurul Iman tahun 1931 M. Oleh H. Abd. Somad, di Sumatera Timur didirikan pesantren Syekh Hasan Maksum pada tahun 1916. Di Purbabaru Tapanuli berdiri pesantren dan madrasah Mustawafiyah oleh Syekh Mustafa Husein pada tahun 1913 M.

Adapun pesantren di Jawa antara lain; pondok pesantren Tebuireng Jombang oleh K.H. Hasyim Asyari pada tahun 1899, pondok tambak beras oleh K.H. Wahab Hasbullah dan pondok Rejoso Peterongan Jombang oleh K.H. Tamin pada tahun 1919 M. Kedua pondok tersebut juga mempunyai madrasah formal. Selain itu ada pondok Modern Gontor yang berdiri pada tahun 1926 oleh K.H. Imam Zarkasy dan K.H. Sahal.²⁰

Sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman, terutama setelah Indonesia merdeka, telah timbul perubahan-perubahan dalam dunia pesantren. Telah banyak diantara pesantren yang menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tersebut, kendatipun disana sini masih ditemukan juga pesantren yang bersifat konservatif.

Pesantren mulai berbenah diri dengan melakukan berbagai inovasi untuk pengembangan sistem pendidikan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah. Dalam aspek kurikulum yaitu dengan masuknya pengetahuan umum dan keterampilan kedalam pesantren adalah sebagai upaya untuk memberikan bekal tambahan agar para santri bila telah menyelesaikan pendidikannya dapat hidup

¹⁹ Alamsyah Ratu Prawiranegara, *Pembinaan Pendidikan Agama* (Jakarta: Depag. RI, 1982), 41

²⁰ Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, cet ke-12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 194

layak dalam masyarakat. Terjadinya perubahan sistem pembelajaran dengan sistem klasikal yang menggunakan sarana dan peralatan pengajaran madrasah sebagaimana yang berlaku di sekolah- sekolah. Adanya pesantren yang membuka, membina dan mengelola madrasah- madrasah atau sekolah umum, baik tingkat dasar, menengah, maupun perguruan Tinggi.²¹

Sebagaimana pesantren yang semakin lama semakin berkembang, kendati demikian ada 5 unsur pokok yang melekat pada istilah pesantren, yaitu: adanya pondok pesantren, adanya masjid, adanya santri, adanya kyai, dan pengajian kitab-kitab klasik.

2. Sekolah

Sekolah adalah lembaga pendidikan yang penting sesudah keluarga, karena makin besar kebutuhan anak, maka orang tua menyerahkan tanggung jawabnya sebagian kepada lembaga sekolah ini. Sekolah berfungsi sebagai pembantu keluarga dalam mendidik anak.²² Sekolah yang dimaksud disini adalah sekolah yang menitikberatkan kepada pendidikan formal, di sekolah prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa, ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus, ada jam- jam tertentu waktu belajar serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan serta perlengkapan-perengkapan dan peraturan- peraturan lainnya.

Sekolah- sekolah buat pertama sekali telah mulai berdiri di Indonesia pada zaman VOC tahun 1607, VOC mendirikan sekolah yang pertama di Ambon, pada tahun 1632 telah ada sejumlah 16 buah sekolah di Ambon, tahun 1645 meningkat menjadi 33 buah. Tujuan pertama mendirikan sekolah ini adalah untuk menyebarkan agama Katolik dengan menyebarkan Protestan, Calvinisme.

Di Jakarta sekolah pertama didirikan tahun 1617, tahun 1636 jumlahnya menjadi 3 buah. Tujuan sekolah ini didirikan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten pada VOC.²³

Penyelenggaraan pendidikan di sekolah- sekolah pemerintah di Hindia-Belanda, pada dasarnya merupakan cerminan dari sistem pendidikan kolonial Belanda. Adanya kaitan antara politik dan pendidikan, agaknya ikut menjadikan sistem pendidikan kolonial Belanda menjadi rumit. Keinginan untuk menerapkan prinsip deskriminasi, menyebabkan penjenisan sekolah menjadi banyak.

Secara garis besarnya, jenis- jenis sekolah tersebut antara lain:²⁴

²¹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan....*, 376

²² Zuhairini, dkk., *Filsafat....*, 179

²³ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan....*, 76

- a. Pendidikan rendah (*Lager Onderwijs*), dibagi menjadi
 - 1) Sekolah Rendah berbahasa pengantar bahasa Belanda, yang terdiri atas;
 - a) Sekolah rendah Eropa (*Eropeesche Lager School*)
 - b) Sekolah Bumiputera kelas satu, terdiri atas;
 - (1). Sekolah Cina Belanda
 - (2). Sekolah Bumiputera Belanda.
 - 2) Sekolah Rendah berbahasa pengantar bahasa daerah, yang dibagi menjadi tiga, yaitu:
 - a) Sekolah Bumiputera kelas dua (*Inlandsche School Tweede Klasse*)
 - b) Sekolah Desa (*Volksschool*)
 - c) Sekolah Peralihan
 - 3) Sekolah peralihan (*Schakelschool*), sebagai sekolah peralihan dari sekolah Desa ke sekolah dasar yang berbahasa pengantar bahasa Belanda.
- b. Pendidikan Menengah (*Middlebaar Onderwijs*) terdiri atas:
 - 1) Sekolah Menengah Umum, yaitu: MULO (*Meer Uitgereid Lager Onderwijs*) dan AMS (*Algemene Middlebaar School*)
 - 2) Sekolah Tinggi Warga Negara (*Hogere Burgerschool*)
- c. Pendidikan Tinggi, terdiri dari tiga jurusan yaitu:
 - 1) Sekolah Tinggi Kedokteran.
 - 2) Sekolah Tinggi Hukum.
 - 3) Sekolah Tinggi Teknik.

Penjenisan sekolah diatas menunjukkan kenyataan akan adanya diskriminasi dalam sistem pendidikan kolonial Belanda. Hal itu terlihat dalam sikap Belanda yang membedakan sekolah- sekolah menjadi sekolah untuk orang Eropa, Cina, dan Bumiputra, dengan demikian dari berbagai segi, kesempatan belajar bagi penduduk pribumi di sekolah- sekolah pemerintah senantiasa mendapatkan hambatan.

Lahirnya sebuah kebijakan, termasuk kebijakan pendidikan, tidak dapat dipisahkan dari respon terhadap realitas kehidupan sosial.²⁵ Setelah Indonesia merdeka, upaya yang dilakukan pemerintah dalam menyempurnakan sekolah formal rintisan Belanda telah dilakukan. Mulai dari pembentukan Panitia Penyelidik Pendidikan dan Pengajaran tahun 1946 yang diketuai oleh Ki Hajar

²⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan....*, 252

²⁵ Masngud, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: IDEA PRESS, 2010), vii

Dewantara, dilanjutkan pengadaan kongres- kongres pendidikan yang melahirkan Undang- Undang tentang Dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, dilanjutkan dengan adanya ketetapan MPRS no. XXVII/ MPRS1966 yang berisi tentang dasar Pendidikan Nasional, Tujuan Pendidikan Nasional, dan Isi Pendidikan Nasional, sampai kebijakan pemberian pendidikan agama pada sekolah umum.

3. Madrasah

Tumbuh dan berkembangnya madrasah di Indonesia tidak dapat dilepaskan dengan tumbuh dan berkembangnya ide- ide pembaruan dikalangan umat Islam. Diantara ulama yang berjasa dalam menggagas tumbuhnya madrasah di Indonesia antara lain Syekh Abdullah Ahmad, pendiri Madrasah Adabiyah di Padang pada tahun 1909. Pada tahun 1915 madrasah ini menjadi HIS Adabiyah yang tetap mengajarkan agama.²⁶

Syekh M. Thaib Umar pada tahun 1910 mendirikan madrasah School di Batu Sangkar. Tiga tahun kemudian madrasah ini ditutup dan baru pada tahun 1918 dibuka kembali oleh Mahmud Yunus dan pada tahun 1923 madrasah ini berganti nama dengan Diniyah school. Pada tahun yang sama Rangkayo Rahmah El Yunusiyah mendirikan Madrasah diniyah putri di Padang Panjang, sebelumnya yaitu pada tahun 1915 Zainuddin Labai al- Yunusi mendirikan madrasah Diniyah di Padang Panjang.²⁷ madrasah diniyah inilah yang kemudian berkembang di Indonesia, baik merupakan bagian dari pesantren atau surau, maupun berdiri diluarnya.²⁸ Pada periode selanjutnya, selain madrasah dikelola secara pribadi, madrasah juga dikelola oleh organisasi. Misalnya Muhammadiyah, al- Irsyad, NU, Persatuan Islam/ persis yang memiliki madrasah ibtidaiah, awaliyyah, madrasah Muallimin, dan lain sebagainya.

Perkembangan madrasah terkait erat dengan peran Kementerian Agama RI sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dikalangan pengambil kebijakan. Tentunya, tanpa melupakan usaha- usaha keras yang sudah dirintis oleh sejumlah tokoh, seperti KH. Ahmad Dahlan, KH. Hasyim Asyari, dan Mahmud Yunus.

²⁶ Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945- 1975*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978), 49

²⁷ Mulyanto Sumardi, *Bunga Rampai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantren*, (Jakarta: Pustaka Biru, 1980), 49

²⁸ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan...*, 99

Dalam hal ini, Kementerian Agama secara lebih tajam mengembangkan program-program perluasan dan peningkatan mutu madrasah.²⁹

Perubahan yang terjadi pada Madrasah dimulai dengan dibukanya Madrasah Wajib Belajar (MWB) pada awal tahun 50-an oleh Kementerian Agama di bawah Menteri Agama K.H. Wahid Hasyim.³⁰ Upaya pemerintah selanjutnya untuk meningkatkan status madrasah adalah dengan jalan menegerikan madrasah-madrasah swasta yang dikelola oleh masyarakat, baik berbentuk pribadi maupun organisasi. Tercatat sejumlah ratusan madrasah swasta yang dijadikan madrasah negeri yang meliputi tingkat itidaiyah dengan nama MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri), Tingkat Tsanawiyah dengan nama Madrasah Tsanawiyah Agama Islam Negeri (MtsAIN, dan Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri (MAAIN).³¹

Seiring dengan berkembangnya zaman, madrasah nampaknya juga semakin berbenah dengan terus melakukan pembaharuan. Madrasah didirikan dengan maksud untuk mengumpulkan keunggulan yang ada pada pesantren dan sekolah. Pesantren memiliki keunggulan dalam ilmu- ilmu agama Islam dan sekolah memiliki keunggulan dalam ilmu- ilmu umum. Madrasah didirikan agar memiliki keunggulan pada ilmu- ilmu agama Islam sebagaimana yang ada pada pesantren dan memiliki keunggulan pada ilmu- ilmu umum sebagaimana yang ada pada sekolah. Jika dalam kenyataan sekarang, kebanyakan kualitas madrasah kalah jika dibandingkan dengan pesantren dalam ilmu- ilmu agama Islam dan kalah dengan sekolah dalam ilmu- ilmu umum, adalah realitas yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, harus ada upaya untuk melakukan pembaruan kembali terhadap madrasah pada tujuan awal madrasah didirikan.³²

Pembaruan madrasah terkait erat dengan berbagai faktor pengelola, sumber daya kependidikan (guru, laboran, pustakawan, dan siswa), sarana dan prasarana, kurikulum, lingkungan dan sebagainya. Pengelola madrasah yang meliputi Komite Madrasah, Kepala Madrasah dan Wakil- Wakilnya, Kasi Mapenda Kemenag, Kabid Mapenda Kanwil Kemenag, dan Direktur Mapenda Kemenag RI sangat menentukan pembaruan madrasah, karena mereka ang secara langsung membuat perencanaan dalam upaya pembaruan Madrasah. Madrasah mengalami pembaharuan atau tidak sangat dipengaruhi oleh mereka. Apalagi pada era

²⁹ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan....*, 349

³⁰ *Ibid.* 350

³¹ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan....*, 102

³² Sutrisno, *Pembaruan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011), 63

globalisasi, kemampuan madrasah dapat berkompetisi atau tidak sangat dipengaruhi oleh mereka.³³

Akhirnya, dalam perkembangan madrasah dari era awal berdirinya sampai pada saat ini terus mengalami pembaharuan, dan pembaharuan tersebut bisa dilaksanakan dengan berbagai cara, mulai dari pembenahan sumber daya kependidikannya, sarana dan prasarananya, kurikulumnya, dan lain sebagainya.

4. Pendidikan Tinggi Islam

Perguruan Tinggi (PT) merupakan jenjang pendidikan yang dilaksanakan setelah Sekolah Menengah Atas. Dalam Undang Undang No. 20 tahun 2003, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ Pendidikan Tinggi merupakan kelanjutan pendidikan menengah yang diselenggarakan untuk menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan atau enciptakan ilmu pengetahuan, teknologi atau kesenian.

Pendidikan Tinggi bisa dijabarkan lagi dalam bentuk Akademi, Politeknik, Sekolah Tinggi, Institut, atau Universitas. Artinya, ada banyak ragam yang bisa dikatakan untuk menyebutkan suatu jenjang Pendidikan Tinggi sebagaimana disebutkan di atas. Di Indonesia semua bentuk lembaga pendidikan itu disebut perguruan tinggi.³⁴

Berdasarkan sejarah, semangat untuk mendirikan perguruan tinggi Islam telah muncul pada tahun 1930, hal ini diperkuat dengan ungkapan Mahmud Yunus yang mengatakan bahwa di Padang Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru guru Agama Islam (PGAI).³⁵

Pada April tahun 1945 Masyumi berhasil membentuk Panitia Perencana Pendirian STI dibawah pimpinan Moh. Hatta. Pada tanggal 8 juli 1945, STI berhasil diresmikan pendiriannya di Jakarta. Namun, STI terhenti karenaterjadi peperangan antara pasukan sekutu Belanda dengan rakyat Indonesia yang akhirnya Belanda berhasil menguasai Jakarta. Kemudian Pemerintah Negara RI pindah dari Jakarta ke Yogyakarta, pada tanggal 10 April 1946, STI dibuka kembali di Yogyakarta. Pada tanggal 10 aret 1948, STI berubah menjadi Universitas Islam Indonesia (UII) dengan empat fakultas, yaitu Fakultas Agama, Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan. Kemudian melalui Perpres No. 34 tahun 1950 tertanggal 14

³³ *Ibid.* 70

³⁴ Ramayulis, *Sejarah Pendidikan....*, 367

³⁵ Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan....*, 123

Agustus 1950, Fakultas Agama UII dinegerikan menjadi Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta. Selanjutnya, melalui Perpres No 11 tahun 1960, PTAIN dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama) dilebur menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang berkedudukan di Yogyakarta. Kemudian IAIN berkembang di Jakarta dan berkembang terus di kota kota lain sampai tahun 1974 menjadi 14 IAIN. Sampai sekarang, PTAIN berkembang menjadi 53, dengan perincian 6 UIN, 14 IAIN, dan 33 STAIN.³⁶

Setelah Fakultas Agama UII dinegerikan menjadi PTAIN, UII tetap terus berkembang, yang kemudian disusul oleh PTAISlain seperti UMI di Makassar, Unisba di Bandung, Unisula di Semarang, Unisma di Malang, dan Universitas Universitas dibawah persyarikatan Muhammadiyah yang tergabung pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM). Sampai sekarang jumlah PTAIS di Indonesia tidak kurang dari 450 PT.³⁷ Bahkan menurut Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan bahwa Indonesia memiliki lebih banyak perguruan Tinggi Islam jika dibandingkan dengan negara negara yang selama ini menjadi pusat pendidikan tinggi Islam seperti Mesir dan Arab Saudi. Ia menyebutkan bahwa Mesir tercatat memiliki 55 perguruan tinggi Islam, Arab Saudi punya 60 perguruan tinggi Islam dan Malaysia punya 35 perguruan tinggi Islam. Sementara di Indonesia, menurut dia, ada sampai 6000 perguruan tinggi keagamaan Islam.³⁸

Hal ini menunjukkan, bahwa potensi perguruan tinggi keagamaan Islam di Indonesia sangat menjanjikan. Pada era globalisasi ini, PTI diharapkan semakin berkembang dan mampu lebih baik lagi baik dari segi kuantitas maupun kualitas.

PENUTUP

Pondok Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia yang merupakan cikal bakal tumbuh dan berkembangnya lembaga lembaga pendidikan yang lain. seiring dengan perkembangan zaman, pesantren semakin berbenah baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sebagaimana pesantren yang semakin lama semakin berkembang, pada saat ini setidaknya pesantren memiliki 5 unsur pokok, yaitu: adanya pondok pesantren, adanya masjid, adanya santri, adanya kyai, dan pengajian kitab- kitab klasik. Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dan berdiri atas jasa pemerintah Belanda, meskipun *stereotype* yang melekat pada sekolah adalah lembaga yang lebih menekankan pada mata pelajaran umum, akan tetapi setelah

³⁶ Sutrisno, *Pembaharuan dan Pengembangan...*, 89

³⁷ *Ibid.* 90

³⁸ Agus Sasongko, *Jumlah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia Terbanyak*, dalam Republika.co.id.Kendari diakses pada tanggal 05 Januari 20118

Indonesia merdeka pemerintah mempunyai perhatian serius dengan memberikan mata pelajaran agama di dalamnya.

Selanjutnya, perkembangan madrasah terkait erat dengan peran Kementrian Agama RI sebagai andalan politis yang dapat mengangkat posisi madrasah sehingga memperoleh perhatian yang terus menerus dikalangan pengambil kebijakan. Perguruan Tinggi (PT) merupakan jenjang pendidikan yang dilaksanakan setelah Sekolah Menengah Atas. Perguruan Tinggi untuk pertama kalinya berdiri di Padang Sumatera Barat pada tanggal 9 Desember 1940 telah berdiri perguruan tinggi Islam yang dipelopori oleh Persatuan Guru guru Agama Islam (PGAI). Sama seperti lembaga pendidikan yang lainnya, Perguruan Tinggi juga terus melakukan pembenahan baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dan sampai saat ini di Indonesia terdapat 6000 perguruan tinggi keagamaan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhiruddin, KM, *Lembaga Pendidikan Islam di Nusantara*, Jurnal Tarbiya, vol 1 no. 1-2015
- Daryanto, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya: Apollo E. Sembiring, 2005)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Drajat, Zakiah, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996)
- Haidar Putra Daulay, *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- Hasbullah, *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Cet I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1996)
- <http://istanailmu.com/2011/02/03/latar-belakang-munculnya-lembaga-pendidikan-islam-di-indonesia/html> diakses tanggal 05 Januari 2018
- Karim, Abdul *Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, 2009)
- Masngud, *Analisis Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Yogyakarta: IDEA PRESS, 2010)
- Nata, Abuddin, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana 2010)
- Prawiranegara, Alamsyah Ratu, *Pembinaan Pendidikan Agama* (Jakarta: Depag. RI, 1982)
- Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006)
- Sasongko, Agus *Jumlah Perguruan Tinggi Islam di Indonesia Terbanyak*, dalam Republika.co.id. Kendar di akses pada tanggal 05 Januari 2018

- Sumardi, Mulyanto, *Bunga Rampai Pemikiran Tentang Madrasah dan Pesantren*, (Jakarta: Pustaka Biru, 1980)
- Sumardi, *Sejarah Singkat Pendidikan Islam di Indonesia 1945- 1975*, (Jakarta: Dharma Bhakti, 1978)
- Sutrisno, *Pembaruan dan Pengembangan Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Fadilatama, 2011)
- UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas (Bandung: Citra Umbara, 2009)
- W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet ke-12* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)
- Zuhairini, dkk. *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009)
- Zuhairini, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, cet ke-12 (Jakarta: Bumi Aksara, 2013)

